

Potret Suram terhadap Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Paniai

Jodhy kurnianto

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, jodhy8807@gmail.com

Muhamad Secha Aulia Danova

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sechakaka99@gmail.com

Abstract

Human Rights itself is a right that is obtained and owned by every human being since he was born into the world as a gift that has been given by God. With these rights humans should be able to develop and achieve goals in carrying out a life in this world. In this case, each individual and as well as the state, have a role in their own duties towards the implementation of human rights. The state has a responsibility towards the obligation to ensure that human rights themselves have a role for every society, namely in getting respect, protection, fulfillment and promotion. The large number of cases of human rights violations that have occurred in Indonesia, of course, has led to increased attention being paid to the handling of these cases. In Indonesia, the handling of cases of human rights violations has been fought for since the reform era. Various kinds of good efforts are being made by the government, even in community organizations and also non-governmental organizations, even though in reality the results are still very far from what the Indonesian people have hoped for. Various kinds of efforts to protect human rights are being initiated and have started to run until now. As for the government, it should be stricter to the perpetrators of these violations. One of the cases of human rights violations that occurred in Indonesia is the case of violations that occurred in the Papua region, namely Paniai. In order to defend and maintain the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, the Indonesian government has issued various policies.

Keywords: Human Rights, Paniai, Handling, Violation

Abstrak

Hak Asasi Manusia sendiri merupakan suatu hak yang diperoleh dan dimiliki oleh setiap manusia sejak dirinya telah dilahirkan ke dunia sebagai karunia yang telah diberikan oleh Tuhan. Dengan hak tersebut manusia harusnya dapat berkembang dan agar mencapai tujuan dalam menjalankan suatu kehidupan dalam dunia ini. Pada hal ini masinh-masing individu dan maupun negara, memiliki peran dalam tugasnya sendiri terhadap pelaksanaan HAM. Negara mempunyai tanggung jawab terhadap kewajiban untuk menjamin bahwa HAM itu sendiri mempunyai peranan bagi setiap masyarakat yaitu dalam mendapat penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan. Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, tentunya menyebabkan penanganan dalam penyelesaian kasus tersebut harus semakin diperhatikan. Pada negara Indonesia penanganan terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia telah diperjuangkan sejak era reformasi. Berbagai macam upaya baik yang tengah dilakukan oleh para pemerintah, bahkan dalam organisasi masyarakat maupun juga Lembaga Swadaya Masyarakat, meskipun pada kenyataan hasilnya masih sangat jauh terhadap yang sudah diharapkan oleh bangsa Indonesia. Berbagai macam upaya terhadap perlindungan hak asasi manusia yang tengah dirintis dan sudah mulai berjalan hingga sampai saat ini. Sedangkan untuk pemerintah, seharusnya lebih tegas kepada sang pelaku pelanggaran tersebut. Salah satu kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia adalah kasus pelanggaran yang terjadi di daerah Papua yaitu Paniai. Dalam rangka terhadap pertahanan dan menjaga keutuhan dari NKRI, para pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan, khususnya pada wilayah pengkondisian pada wilayah Papua yang selanjutnya diikuti dengan adanya berbagai macam Tindakan dalam penegakan dalam wujud bentuk pelakuan operasi-operasi kemanan yang tujuannya untuk menghentikan Gerakan separatisme dalam daerah Papua.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Paniai, Penanganan, Pelanggaran

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia sendiri sebuah hak yang diperoleh dan dipunyai oleh tiap-tiap manusia dari dirinya telah dilahirkan ke dunia sebagai karunia yang telah diberikan oleh Tuhan. Dengan hak tersebut manusya harusnya dapat berkembang dan agar mencapai tujuan dalam menjalankan suatu kehidupan dalam dunia ini. Pada hal ini masinh-masing individu dan maupun negara, memiliki peran dalam tugasnya sendiri terhadap pelaksanaan HAM. Negara mempunyai tanggung jawab terhadap kewajiban untuk menjamin bahwa HAM itu sendiri mempunyai peranan bagi setiap masyarakat yaitu dalam mendapat penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan.

Negara tepatnya pada pemerintah, dapat dikaitkan terhadap pelanggaran HAM, apabila yang tengah melakukan pelanggaran tersebut merupakan instansi atau para pemimpin dan juga Menteri yang membuat atau menjalankan sebuah kebijakan negara. Korbannya disini dalam pelanggaran HAM adalah masyarakat, termasuk perseorangan dan kelompok. Maraknya pelanggaran-pelanggaran HAM yang melanda di Indonesia, tentunya menyebabkan penangangan dalam penyelesaian kasus tersebut harus semakin diperhatikan. Salah satu bentuk pengingkaran HAM yang berlangsung di Indonesia adalah pengingkaran yang terjadi di daerah Papua yaitu Paniai. Pengingkaran Hak Asasi Manusia yang ada di Papua mempunyai pengaruh ketegangan politik yang lumayan sangat tinggi. HAM sendiri dapat diartikan menjadi sebuah hak yang telah dipunyai terhadap semua individu dan hak tersebut tidak dapat dilanggar oleh orang lain. Hak inilah yang menjadi dasar untuk semua orang agar tidak bisa berbuat semena mena, dan ditujukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu tersebut sebagai seorang manusia.

Dalam rangka terhadap pertahanan dan menjaga keutuhan dari NKRI, para pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan, khususnya pada wilayah pengkondisian pada wilayah Papua yang selanjutnya diikuti dengan adanya berbagai macam Tindakan dalam penegakan dalam wujud bentuk pelakuan operasi-operasi kemanan yang tujuannya untuk menghentikan Gerakan separatism dalam daerah Papua. Berbagai macam bentuk Tindakan operasai yang telah dan tengah dilakukan, telah menimbulkan banyaknya bentuk pelanggaran HAM yang tengah dialami oleh beberapa korban yang mirisnya sama sekali tidak mempunyai kaitan dengan adanya kegiatan separatis³. Dalam hal ini peran negara khususnya adalah aparat kemanan, harusnya mempunyai sebuah kewenangan untuk dapat melakukan sebuah kegiatan operasi kemanan untuk ditujukan dalam rangka agar dapat memperthankan keutuhan suatu wilayah di Indonesia. Namun demikan, dalam praktiknya lebih sering keluar dari apa yang sudah kita bayangkan. Banyaknya penyimpangan yang berimbang pada terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM yang semakin marak terjadi pada daerah Papua.

Dalam hal penanganan kasus pelanggaran HAM ini seharusnya pemerintah harus banyak meratifikasi terhadap instrument-instrumen HAM, tetapi demikian instrumen tersebut yang ada kaitannya dengan HAM tidak pernah dijalankan dengan sedemikian rupa oleh para aparat penegak hukum yang telah dipercaya terhadap pemerintah di daerah Papua tersebut. Sehingga memberi dampak pada ruang demokrasi yang semakin tertutup di daerah tersebut dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh para petinggi melalui aparat-aparat seperti pembunuhan, penculikan, dan penekanan kebebasan berekspresi. Penanganan dan penegeakan HAM di Papua dinilai tidak dapat berjalan dengan semestinya dan tidak sesuai dengan napa yang sudah di harapkan oleh para masyarakat papua. Banyaknya para aktivis yang pro pada demokrasi ternyata dibunuh sebelum diadili pada pengadilan, sedangkan para pelaku yaitu aparat tidak dikenai hukuman atau kebal terhadap hukum.

Metode Penelitian

Dalam pembuatan artikel ini menggunakan metode yaitu hukum normatif atau hukum doktrinal, yaitu suatu kajian yang bertujuan untuk mengkaji kaidah atau norma hukum. Hukum normatif disebut juga penelitian yang terjadi melalui penelaahan kepustakaan atau data sekunder, dalam penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Metode penelitian yang saya gunakan berasal dari berbagai sumber dan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan

1. Penanganan HAM di Indonesia

Pelanggaran tentang Hak Asasi Manusia seharusnya menjadi sorotan terhadap penanganannya. Dikarenakan perlindungan Hak Asasi tersebut memanglah sangat dibutuhkan untuk tiap individu. Bukan hanya perlindungan sebagai bentuk pencegahan, tetapi juga perlindungan terhadap seorang korban pelanggaran tersebut sangatlah diperlukan. Karena hal tersebut menyangkut tentang kelanjutan hidupnya, bagaimana cara seorang tersebut agar bisa pulih dari rasa traumatic akan pelanggaran Hak Asasinya⁶. Disini peran semua pihak turut berperan penting dalam pemenuhan hak tersebut, dimana masing-masing individu mampu untuk menahan, menjaga setiap perbuatan yang akan dilakukan agar tidak terjadi sebuah pelanggaran HAM.

Pada negara Indonesia penanganan terhadap kasus pelanggaran HAM telah diperjuangkan sejak era reformasi. Berbagai macam upaya baik yang tengah dilakukan oleh para pemerintah, bahkan dalam organisasi masyarakat maupun juga Lembaga Swadaya Masyarakat, meskipun pada kenyataan hasilnya masih sangat jauh terhadap yang sudah diharapkan oleh bangsa Indonesia⁷. Berbagai macam upaya terhadap perlindungan HAM yang tengah dirintis dan sudah mulai berjalan hingga sampai saat ini. Sedangkan untuk pemerintah, seharusnya lebih tegas kepada sang pelaku pelanggaran tersebut. Tidak memandang bulu terhadap pemberian sanksi, dan bertindak secara seadil-adilnya. Memberikan ruang kebebasan kepada para masyarakat maupun aktivis untuk dapat menyuarakan keresahan mereka, mendengarkan dan juga memahami permasalahan mereka. Bukan membubarkan dan seolah tutup telinga tentang apa yang sudah mereka suarakan. Hal ini membuat pemerintah dan para aparat lebih memperhatikan terkait Undang-Undang yang

telah mengatur tentang HAM. Bagaimana caranya untuk mengimplementasikan hal tersebut kepada para masyarakat agar tidak terjadi sebuah pelanggaran HAM.

2. Penyebab terjadinya pelanggaran HAM di Papua

Berita mengenai pengingkaran Hak Asasi Manusia terjadi di daerah Papua bukan merupakan sebuah kasus yang baru. Berbagai macam kasus sudah ada sejak dahulu, contohnya seperti kasus stigmatisasi, diskriminasi dan yang lain. Banyaknya para aktivis pembela HAM Ketika menyuarakan pendapatnya, aksi damainya tersebut seketika dibubarkan oleh aparat. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk menyuarakan kebebasan berekspresi mereka terlebih pada tuntutannya kepada para pemerintah. Tidak sampai disitu, kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua menyangkut juga tentang kekerasan, pembunuhan hingga penyiksaan. Dalam kenyataan penanganan terhadap penyelesaian konflik di daerah Papua, tetap sama dan tidak pernah berubah meskipun beberapa pergantian oleh beberapa rezim. Dalam kenyataannya keamanan dan militer hingga saat ini tetap ada dan masih tetap digunakan dengan beralasan pada ancaman keamanan dan pada kedaulatan negara. Selanjutnya hal itu diperparah saat terjadi perubahan pada politik nasional seiring dengan robohnya rezim orde baru.

Hal-hal yang dilakukan selama penanganan kasus atau konflik yang terjadi tidak ada menandakan gejala perubahan tentang pola penanganan di Papua, dikarenakan pada kenyataannya pendekatannya yang dilakukan bertumpu pada penggunaan aparat yang masih diberlakukan. Tetapi pada realitanya pendekatan tersebut dinilai masih dijalankan dengan setengah hati oleh pemerintah pusat dalam penyelesaian kasus yang terjadi. Sehingga, sampai saat inilah ada berbagai macam Tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang seringkali banyak ditemui di daerah Papua. Yang disayangkan adalah pada pelanggaran tersebut banyak kali dilaksanakan pada pemerintah Indonesia kepada masyarakat awam yang berada di daerah Papua, baik itu dilakukan dengan diam-diam maupun dilakukan secara terang-terangan.

3. Peristiwa Paniai terkait dengan Hak Asasi Manusia

Berbicara terkait kasus pengingkaran HAM yang terjadi di Papua tidak asing dengan salah satu kasus yang terjadi sejak 2014 silam, yaitu pelanggaran HAM di Paniai. Pelanggaran ini diduga berasal dari sebuah kelompok pemuda yang tengah mengejar para anggota TNI yang sedang mengendarai mobil patroli yang tidak menyalaikan lampu mobil saat tengah berjalan di malam hari. Tetapi, teguran yang tengah dilayangkan oleh sebuah kelompok pemuda tersebut tidak dihiraukan dan berakhir dengan pertengkarannya antara anggota TNI dan sekelompok anggota pemuda. Pertengkarannya yang terjadi tersebut menyebabkan sebuah penganiayaan kepada tiga orang remaja yang dilakukan oleh anggota TNI. Kemudian dikarenakan masyarakat yang tidak terima dengan adanya penganiayaan tersebut, masyarakat menuju Polsek Paniai guna untuk meminta penjelasan sebagai bentuk protes terhadap Tindakan TNI pada kelompok remaja tersebut.

Karena pada saat kejadian masyarakat yang mendatangi Polsek Paniai tersebut berjalan dengan semakin tidak kondusif dikarenakan tidak adanya penjelasan dari pihak yang terkait masyarakat melakukan Tindakan yang sedikit anarkis. Namun, disayangkan para aparat TNI tersebut menanggapi dengan cara represif yaitu dengan cara melakukan

sebuah tembakan guna bertujuan untuk membubarkan masa dari masyarakat. Imbasnya penembakan yang dilakukan oleh TNI dengan tujuan untuk membubarkan masa dari masyarakat mengakibatkan beberapa orang mengalami luka berat bahkan sampai menewaskan beberapa orang. Dari sinilah yang menyebabkan bahwa persitiwa yang terjadi pada Paniai merupakan pelanggaran HAM yang berat, karena menyangkut hak hidup orang banyak dan memuat aparat negara. Pelanggaran HAM berat yang terjadi di Paniai tersebut yang telah dilakukan oleh gabungan antara TNI dan POLRI yang seharusnya mereka telah dinilai cakap mengenai UU yang sudah melingkupi tugas dan kewajiban dalam dia bertugas untuk menjalankan sebuah perdamaian dalam masyarakat¹⁰. Namun realitanya berbanding terbalik, justru para anggota dari TNI dan POLRI tersebut yang melakukan sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Akibat dari kasus tersebut telah menjelaskan bahwa sebuah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berawal dari kurangnya kesadaran hukum didalam masyarakat dan pejabat.

4. Perkembangan terhadap kasus Paniai

Pelanggaran HAM berat yang terjadi di Paniai belum menemui titik terang dan belum menemukan terhadap bentuk penyelesaiannya. Pada penanganan kasus HAM berat komnas HAM disini memiliki peranan penting untuk menyelesaikan penyelesaian yang terjadi dalam kasus konflik pelanggaran HAM tersebut. Pelanggaran HAM berat tersebut merupakan sebuah kewenangan Kejaksaan Agung untuk segera menindaklanjuti perkembangan terhadap penyelesaian kasus tersebut dan juga segera melakukan investigasi lanjutan yang lebih mendalam terhadap penemuan masalah yang lebih jelas pada kasus pelanggaran HAM dan selanjutnya akan diteruskan ke tahap penuntutan¹¹.

Namun sangat disayangkan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat ini belum terlihat jelas titik terangnya dan sampai detik ini berkas dari pelanggaran tersebut selalu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung yang alsannya belum terpenuhinya syarat-syarat formil dan juga materill. Hingga pada akhirnya penyelesaian terhadap kasus ini bisa saja terjadi apabila beriringnya keselarasan tiap Lembaga yang tengah bersangkutan. Tetapi sulitnya kasus ini terselesaikan jika diperhatikan, tahapan-tahapan yang terdapat dalam penyelesaian kasus ini misalnya dalam tahap penyidikan yang dilimpahkan kepada Komnas HAM, tahap penyidikan dan juga penuntutan yang dilakukan dari Kejaksaan Agung dan pada tahap penyelesaian pada tahap pengadilan diselesaikan oleh Mahkamah Agung.

Mengapa kasus tersebut mempunyai kesan seolah terlihat berbelit dikarenakan setiap masing-masing Lembaga mempunyai tujuan visi yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh sebab itu perlunya penyatuhan visi diantara Lembaga-lembaga agar penyelesaian kasus tersebut dapat berjalan dan segera menemukan titik terang sesuai tuntutan dari keluarga para korban. Perlunya menekan ego atar Lembaga supaya kasus ini mendapat sebuah titik terang dan dapat dengan cepat untuk diselesaikan.

5. Penanganan yang dilakukan dalam kasus Paniai

Persoalan terhadap perlindungan HAM merupakan sebuah tanggung jawab yang paling utama oleh sebuah negara. Negara mempunyai peranan yang paling penting untuk bertanggung jawab dalam melindungi, menghormati dan memenuhi setiap Hak Asasi Manusia bagi semua warga negaranya. Dalam peranan tersebut bertujuan sebagai bentuk penghormatan sebuah negara kepada Hak Asasi Manusia yaitu dilakukan dengan tidak melakukan intervensi. Selanjutnya, negara wajib mewujudkan pemenuhan dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia dengan Tindakan secara legislative maupun dengan Tindakan administrative. Yang paling terakhir adalah negara diwajibkan untuk memberikan sebuah perlindungan terhadap Hak tersebut kepada setiap perseorangan dari berbagai macam bentuk pelanggaran hak. Pemenuhan dan pertahanan terhadap sebuah Hak Asasi Manusia di Indonesia harusnya ditempatkan kedalam konteks negara hukum sesuai dengan landasan hukum. Didalam kasus Paniai penanganan yang dilakukan negara sebagai pihak yang harusnya memberikan perlindungan terhadap warga negaranya adalah dengan berusaha untuk melaksanakan wewenang dan juga tanggung jawab dalam sebuah penghormatan, pemenuhan, perlindungan HAM yang terjadi di Paniai berdasarkan dengan hukum yang berlaku.

Dalam pemutusan penyelesaian suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia berat di daerah Paniai dengan bertumpu pada peraturan UU mengenai HAM dan pengadilan HAM dinilai sampai saat ini kurang efektif dikarenakan belum terselesainya kasus pelanggaran HAM paniai tersebut.

Penutup

Penanganan Hak Asasi Manusia di Indonesia sudah dimulai pada orde baru. Penanganan tersebut dikatakan mengalami peningkatan dari tiap tahun ketahunnya. Tetapi di dalam perjalannya proses penanganan kasus tersebut tidak semata-mata berjalan dengan tanpa adanya hambatan. Hambatan yang masih sering ditemui dalam proses penanganan kasus pelanggaran HAM biasanya apabila suatu kasus tersebut dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Sedangkan penanganan yang seharusnya ditangani oleh para pemerintah, mereka diharuskan supaya lebih tegas kepada sang pelaku pelanggaran tersebut. Tidak adanya memandang bulu terhadap pemberian sanksi, dan bertindak secara seadil-adilnya. Memberikan ruang kebebasan kepada para masyarakat maupun aktivis untuk dapat menyuarakan keresahan mereka, mendengarkan dan juga memahami permasalahan mereka. Bukan membubarkan dan seolah tutup telinga tentang apa yang sudah mereka suarakan. Hal ini membuat pemerintah dan para aparat lebih memperhatikan terkait Undang-Undang yang telah mengatur tentang HAM. Bagaimana caranya untuk mengimplementasikan hal tersebut kepada para masyarakat agar tidak terjadi sebuah pengingkaran HAM. Salah satu bentuk contoh pengingkaran HAM yang ada di Indonesia adalah pengingkaran Hak Asasi yang terjadi di Papua tepatnya dalam daerah Paniai. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh para aparat TNI dan POLRI yang dalam kenyataannya mereka cakap akan UU yang tengah mengatur Hak Asasi Manusia Tersebut. Berbicara terkait kasus pengingkaran HAM yang terjadi di Papuantidak asing dengan salah satu kasus yang terjadi sejak 2014 silam, yaitu kasus pelanggaran HAM di Paniai.

Kasus pelanggaran ini diduga berawal dari sebuah kelompok pemuda yang tengah menegur para anggota TNI yang sedang mengendarai mobil patrol yang tidak menyalakan lampu mobil saat tengah berjalan di malam hari. Tetapi, teguran yang tengah dilayangkan oleh sebuah kelompok pemuda tersebut tidak dihiraukan dan berakhir dengan pertengkaran antara anggota TNI dan sekelompok anggota pemuda. Pertengkaran yang terjadi tersebut menyebabkan sebuah penganiayaan kepada tiga orang remaja yang dilakukan oleh anggota TNI. Kemudian dikarenakan masyarakat yang tidak terima dengan adanya penganiayaan tersebut, masyarakat menuju Polsek Paniai guna untuk meminta penjelasan sebagai bentuk protes terhadap Tindakan TNI pada kelompok remaja tersebut. Para anggota tersebut malah melakukan pelanggaran Hak Asasi yang masyarakat daerah Paniai. Meskipun hal tersebut sebagai upaya untuk mengkondusifkan para masyarakat dari aksi penyuaraan aspirasi mereka, namun hal yang diambil malah menghilangkan nyawa orang banyak. Hal tersebut kemudian menjadi sebuah kasus pelanggaran HAM yang dinilai cukup berat, dikarenakan pada kejadian tersebut sang TNI dan POLRI menembak kepada masyarakat yang tengah berada di kantor Polri. Dalam kejadian tembak menembak tersebut telah menghilangkan beberapa nyawa masyarakat daerah Paniai, dan juga banyak memberikan luka-luka yang cukup berat pada masyarakat Paniai tersebut.

Dalam proses penanganan pelanggaran kasus HAM paniai banyak mengalami permasalahan dalam proses penyelesaiannya. Permasalahan tersebut muncul karena adanya berbagai macam perbedaan antar Lembaga terkait visi dan tujuan penyelesaiannya. Oleh sebab itu perlunya penyatuan visi diantara Lembaga-lembaga agar penyelesaian kasus tersebut dapat berjalan dan segera menemukan titik terang sesuai tuntutan dari keluarga para korban. Persoalan terhadap perlindungan HAM merupakan sebuah tanggung jawab yang paling utama oleh sebuah negara. Negara mempunyai peranan yang paling penting untuk bertanggung jawab dalam melindungi, menghormati dan memenuhi setiap Hak Asasi Manusia bagi semua warga negaranya. Dalam peranan tersebut bertujuan sebagai bentuk penghormatan sebuah negara kepada Hak Asasi Manusia yaitu dilakukan dengan tidak melakukan intervensi. Didalam kasus Paniai penanganan yang dilakukan negara sebagai pihak yang harusnya memberikan perlindungan terhadap warga negaranya adalah dengan berusaha untuk melaksanakan wewenang dan juga tanggung jawab dalam sebuah penghormatan, pemenuhan, perlindungan HAM yang terjadi di Paniai berdasarkan dengan hukum yang berlaku. Dalam UU tersebut yang telah mengatur mengenai pengadilan HAM memberikan sebuah legitimasi bahwa terhadap penanganan pengingkaran HAM yang berat dapat dituntaskan di pengadilan. Dalam penuntasan pengingkaran Hak Asasi Manusia berat di daerah Paniai dengan bertumpu pada peraturan UU mengenai HAM dan pengadilan HAM dinilai sampai saat ini kurang efektif dikarenakan belum terselesainya kasus pelanggaran HAM paniai tersebut.

CALL FOR PAPER

Vol.3 No.3 (2023)

Ucapan Terimakasih

Sekian saya sebagai penulis ucapan dalam pembuatan artikel ini, Adapun kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas kekurangan saya dalam pembuatan penulisan artikel ini. Juga tidak lupa saya mengucapkan rasa terimakasih saya terhadap Ibu Wiwik selaku dosen pengampu saya dalam mata kuliah Hukum HAM, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya ucapan terimakasih terhadap semua macam bimbingan serta dukungan selama saya menyelesaikan tugas dalam penyusunan tulisan saya. Kurang lebih dari apa yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan dan ketidak sempurnaan didalam pembuatan artikel, saya ucapan terimakasih.

Daftar Pustaka

- Fabiana Meijon Fadul, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DI PAPUA Oleh', 1.7 (2019), 585-600
- Fariz Wajdi, and Imran, 'Pelanggaran HAM Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND STATE RESPONSIBILITY TO THE VICTIMS', *Jurnal Yudisial*, 14.2 (2021), 229-46
<<https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445>>
- Hakim, Lukman, and Nalom Kurniawan, 'Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia', *Jurnal Konstitusi*, 18.4 (2022), 869
<<https://doi.org/10.31078/jk1847>>
- Hassanah, Hetty, 'Kejahatan Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Tradisional', *Maleo Law Journal*, 26, 2017, 217-35
- Huda, Muhammad Miftakhul, 'Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad Miftakhul Huda , Suwandi Dan Aunur Rofiq Pendahuluan Hak Asasi Manusia Yaitu Suatu Qadrat Yang Dimiliki Dan Karunia Yang', 11.1 (2022)
- ICP, Koalisi Internasional untuk Papua, *Hak Asasi Manusia Dan Eskalasi Konflik Di Papua : Laporan Keenam Koalisi Internasional Untuk Papua (ICP) Yang Menyajikan Analisis Pelanggaran Sejak Januari 2017 Hingga Desember 2018 Beserta Tinjauan Umum Perkembangannya Di Tahun 2019* (AKALBUDI Network, 2020)
- Kaisupy, Delvia Ananda, and Skolastika Genapang Maing, 'Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10.1 (2021), 82 <<https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.27056>> Nurmila Sari, Helga, Moh Bagus, Sri Warjiyati, and Kata Kunci Abstrak, 'SOSIO YUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial', 2 (2020) <<http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v12i2.1356>>
- Prasetyo, Mujiono Hafidh, 'Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional', *Gema Keadilan*, 7.3(2020), 115-38 <<https://doi.org/10.14710/gk.2020.9075>>
- Ridwan, Muhammad Syair Fadillah, 'Penyelesaian HAM Di Paniai, Papua', January, 2022, 1-21
- Senjaya, Rustandi, 'Pelanggaran Ham Yang Terjadi Di Papua Dan Poso', *Journal of Islamic and Law Studies*, 6.1(2022), 76-88 <<https://doi.org/10.18592/jils.v6i1.7123>>
- Taum, Yoseph Yapi, 'Kekerasan Dan Konflik Di Papua: Akar Masalah Dan Strategi Mengatasinya', *Jurnal Penelitian*, 19.1 (2019), 1-13
- Widyantara, I Gede Hendra, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Di Papua', *JISOS Jurnal Ilmu Sosial*, 1.7 (2019), 585-

CALL FOR PAPER

Vol.3 No.3 (2023)